

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat judul “Pengembangan Wisata Mangrove Surabaya Berbasis Blue Economy” Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tujuh hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengembangan wisata mangrove, antara lain :

1. Muhammad Nurdin (Nurdin, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Wisata Hutan Mangrove Wonorejo : Potensi Ecotourism Dan Edutourism Di Surabaya” menjelaskan tentang mengembangkan wisata mangrove wonorejo Surabaya menjadi wisata Eco-Tourism dan Edu-Tourism. Kawasan hutan mangrove Wonorejo Surabaya menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove. Selain karena kondisi hutan mangrove yang masih sangat alami, keanekaragaman flora dan fauna yang menjadikan kawasan tersebut sebagai habitat merupakan daya tarik tersendiri. Lebih lanjut, kawasan hutan mangrove Wonorejo dapat pula direkomendasikan sebagai sarana pendidikan bagi kalangan siswa sekolah dan mahasiswa untuk lebih mengenal keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.
2. Sri Wahyuni, Bambang Sulardiono, Boedi Hendarto (Wahyuni, Bambang Sulardiono, & Boedi Hendarto, 2015) yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo,

Kecamatan Rungkut Surabaya” yang menjelaskan tentang cara mengembangkan wisata mangrove Surabaya dengan menerapkan konsep strategi pengembangan ekowisata mangrove adalah mengembangkan konservasi dan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata, mempertegas penegakan hukum dan aturan untuk menjaga fungsi ekosistem mangrove dan penguatan konsep ecotourism di kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya.

3. Priscillia Harly dan Eunike Kristi (O. & P. Eunike Kristi J., S. T. M.Des.Sc, 2013) yang berjudul “Fasilitas Eduwisata Pembudidayaan Mangrove Wonorejo Surabaya” yang menjelaskan tentang pembuatan perancangan arsitektur dan manfaatnya, guna memberikan informasi tentang pentingnya hutan mangrove kepada masyarakat. Selain itu pada fasilitas pengunjung juga dikenalkan hasil-hasil pembudidayaan mangrove yang telah berhasil dikembangkan oleh warga. Proyek ini terletak di kelurahan Wonorejo, menghadirkan fasilitas yang dapat menampung beberapa kegiatan dalam upaya untuk mengenalkan potensi-potensi mangrove non-kayu. Beberapa kegiatan tersebut meliputi pengenalan ekosistem mangrove, kegunaan mangrove non-kayu, dan cara pembudidayaan mangrove. Diharapkan dengan fasilitas ini, pengunjung dapat memahami pentingnya ekosistem hutan mangrove dan potensi-potensi yang dipunyai oleh hutan mangrove.
4. Edi Mulyadi dan Nur Fitriani (Mulyadi & Nur Fitriani, 2013) dengan judul “Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata”

yang menjelaskan tentang pembentukan suatu kepedulian masyarakat dan unsur ekowisata dalam upaya rehabilitasi mangrove dengan menyusun strategi pengembangan dan pengolahan hutan mangrove di Sungai Wain Balikpapan melalui konsep ekowisata berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu : aspek teknis (jenis mangrove, pola dan teknik penanaman mangrove), aspek sosial (jumlah dan kepadatan penduduk, peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove), aspek kelembagaan (dukungan Pemerintah Kota Balikpapan, dukungan Peraturan Perundangan, Partisipasi BLH, dan kalangan Perguruan Tinggi) dengan tujuan untuk membentuk suatu kepedulian masyarakat dan unsur ekowisata dalam upaya rehabilitasi mangrove.

5. Rendi Prayuda dan Dian Venita Sary (Prayuda & Dian Venita Sary , 2020) dengan judul “Strategi Pengembangan Konsep Blue Economy Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir” yang menjelaskan tentang Implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi akuakultur untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan dibidang maritime melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.
6. Anita Dianingrum dan Emiria Letfiani (Dianingrum, Emiria Letifani, & dkk, 2017) dengan judul “Design Concept Of Mangrove Kampung In Surabaya Based On Sustainable” yang menjelaskan tentang pembuatan

konsep desain pengembangan pariwisata berbasis ekowisata. Konsep ekowisata adalah sub-komponen pembangunan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode penelitian dan desain. Metode penelitian menggunakan strategi kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode desain meliputi analisis, sintetik, penilaian, dan keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah merancang alternatif kampung mangrove berbasis ekowisata berkelanjutan.

7. Heritari Idajati, Adjie Pamungkas dan Vely Kukinul S. (Idajati, Adjie Pamungkas, & Vely Kukinul S., 2015) yang berjudul "The Level Of Participation In Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya" yang menjelaskan tentang pengembangan ekowisata mangrove dimana pengelolaannya dilakukan langsung oleh Masyarakat Desa Wonorejo. Tetapi banyak potensi yang ada tidak dieksplorasi dengan baik dan kecenderungannya adalah penurunan kualitas lingkungan. Ekowisata Mangrove belum dioptimalkan objek wisata potensial. Perencanaan yang dilakukan oleh Komunitas Wonorejo dilakukan tidak optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan identifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata mangrove di desa Wonorejo dalam rangka mengembangkan perencanaan ekowisata yang baik melalui perencanaan partisipasi.

2.2 Landasan Teori

Kawasan mangrove merupakan jalur hijau pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Dengan peningkatan jumlah penduduk serta tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi berdampak terhadap eksploitasi tak terkendali pada pemanfaatan kawasan dan hasil hutan mangrove di Kota Surabaya yang berakibat pada kerusakan dan penyusutan lahan atau kawasan mangrove yang ada.

Sebagai upaya perlindungan kawasan mangrove di seluruh Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya menetapkan prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove dengan dibuatnya Peraturan Walikota (Perwali) No. 65 Tahun 2011. Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagaimana tertulis dalam pasal 3 adalah untuk melestarikan kawasan mangrove dan melindungi ekosistem di pesisir pantai Kota Surabaya. Adapun ruang lingkup Peraturan Walikota ini yang terdapat dalam pasal 4, meliputi sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, penyidikan, dan pelaporan. Pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove dilakukan di wilayah Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Bulak, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Asemrowo, dan Kecamatan lainnya yang wilayahnya terdapat kawasan mangrove. Dalam pasal 12, Peraturan Walikota ini juga dijelaskan mengenai pembiayaan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove yaitu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sumber-sumber dana lain yang diperoleh secara sah (JANIA NURDELA, 2015).

Pengelolaan Kawasan Mangrove di seluruh Kota Surabaya diserahkan kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sesuai dengan Pasal 11 ayat 2, Peraturan Walikota No.65 Tahun 2011, terdiri atas:

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya selaku Ketua; Sekretaris Dinas Pertanian Kota Surabaya selaku Sekretaris; Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Anggota; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selaku Anggota; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Anggota; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya selaku Anggota; Camat setempat selaku Anggota; Lurah setempat selaku Anggota; unsur SKPD/instansi terkait selaku Anggota (JANIA NURDELA, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dan Perda Kota Surabaya tentang Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove Di Wilayah Kota Surabaya. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan (UU).

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suatu perubahan dan akan berdampak luas terhadap keseimbangan. Fungsi penetapan kawasan konservasi yaitu :

1. Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kawasan konservasi terdapat batasan dalam pelaksanaan pengelolaannya.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada pengembangan kawasan konservasi yaitu (Amelia, 2013) :

1. Perlindungan pada ekosistem yang ada, utamanya pada ekosistem yang rentan terhadap perubahan.
2. Penelitian dan/atau pendidikan.
3. Penangkapan ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan.
4. Kegiatan budidaya sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

2.2.1 Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan

demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (Siagian, 2005). Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (Siagian, 2005). Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh 112 sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Dari pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu banyak terjadi

kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat dipedesaan. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan dan gorong-gorong. Pembangunan yang dampaknya tidak langsung seperti pembangunan masjid dan pengadaan labor pondok pasantren, memang secara tidak secara langsung dampak tersebut terlihat, pada pembangunan masjid masyarakat bisa shalat berjamaah dan anak-anak bisa mengaji di masjid tersebut, kemudian pada pengadaan komputer membawa peningkatan kesejahteraan warga desa dan anak-anak didik, karena dampaknya akan terlihat ketika mereka sudah besar dan dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari anak desa yang tidak terdidik (Wibawa, 2009). Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil setia kepada pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito, 2001).

2.2.2 Pariwisata

Pariwisata menurut Hutagalung adalah aktivitas dimana seseorang mencari kesenangan dengan menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah (Hutagalung, 2002). Goeldner dan Ritchie mendefinisikan pariwisata sebagai gabungan dari aktivitas, jasa dan industri yang memberikan pengalaman selama perjalanan: transportasi, akomodasi, makanan, minuman, hiburan, shopping,

tempat pusat kegiatan, dan jasa lainnya untuk seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan jauh keluar dari rumah (Goeldner, 2009).

Komponen obyek wisata menurut (Middleton, 2001) antara lain:

1. Daya tarik
2. Aksesibilitas
3. Kenyamanan
4. Akomodasi
5. Aktivitas

Menurut (Giantari, 2015) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan

suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah. Menurut (Sastrayuda, 2010) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena

tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

2.2.3 Blue Economy

Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan: selain karena limbah, kerusakan alam disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Inti dari Ekonomi Biru adalah Sustainable Development yang merupakan koreksi sekaligusperkayaan dari Ekonomi Hijau dengan semboyan “Blue Sky – Blue Ocean” dimana Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap Biru. Suatu proses dimana semua bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja, dengan memberdayakan sumber daya dan masyarakat lokal (Pauli, 2010)

Model Ekonomi kedepan akan memperhitungkan keuntungan dan strategi inovasi dengan mengikuti kondisi alam. Ekonomi Biru merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang telah kurang baik dan menciptakan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang Sustainable. Konsep ini memerlukan adanya peran serta masyarakat (inklusif).

Selain prinsip efisiensi sumber daya di atas, ada sejumlah prinsip yang dianut dalam Ekonomi Biru (Pauli, 2010):

- a. Nirlimbah (zero waste) dan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi sehingga tercipta produksi bersih (clean production). Artinya, limbah dari sebuah proses produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi bagi produksi berikutnya.
- b. Inklusi sosial, yang berarti pemerataan sosial dan kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin.
- c. Inovasi dan adaptasi, yang memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif.
- d. Efek ekonomi pengganda, yang berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak luas dan tak rentan terhadap gejolak harga pasar. Hal ini karena Ekonomi Biru menekankan pada luaran produk yang bersifat ganda sehingga tidak bergantung pada satu produk (core business) semata. Tidak kalah penting juga pemanfaatan sumber daya lokal sebagai keutamaan, selain partisipasi masyarakat secara kolaboratif untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkesinambungan.

2.2.4 Mangrove

Secara ekologi, mangrove dapat didefinisikan sebagai sekumpulan vegetasi tropis yang hidup di zona intertidal pesisir. Mangrove dapat daitikan sebagai kelompok tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekeliling garis pantai dan memiliki adaptasi yang tinggi terhadap salinitas payau dan hidup pada kondisi lingkungan yang demikian. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mendefinisikan hutan mangrove sebagai formasi hutan yang tumbuh dan berkembang

pada daerah landai di muara sungai dan pesisir pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, kawasan mangrove adalah kawasan yang ditumbuhi sekumpulan tumbuhan mangrove yang terdapat di daerah pantai, laguna atau muara sungai, yang oleh masyarakat sering disebut pula dengan hutan bakau (Ula, 2016).

2.2.5 Ekowisata

Konsep ekowisata di dunia pertama kali diperkenalkan oleh pakar ekowisata yang telah lama menggeluti perjalanan alam, yakni Hector Ceballos dan Lascurain, yaitu: "Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas". Yaitu "Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini (Lascurain, 2001).